

Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Ekonomi
Dosen : DR. N. Widyaningsih, S.E., M.Si. M.Sc.
Fakultas/Jurusan : Fakultas Teknik/Perencanaan Wilayah & Kota
Kampus : Universitas Esa Unggul - 2018

MODUL 13 – Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta bagaimana kedua kebijakan ini bekerja.

Materi

Konsep kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

Pengertian

Pemerintah merupakan aktor ketiga dalam siklus perekonomian selain sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu caranya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan public, baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta menerapkan subsidi ataupun pajak.

Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro untuk menuju ke keadaan yang lebih baik melalui pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat. Kondisi yang lebih baik mengandung pengertian terjadinya peningkatan output suatu negara dan terjaganya kestabilan harga.

Jika pemerintah melakukan ekspansi kebijakan moneter, maka jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan kebijakan kontraktif, maka jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Istilah lain yang berkaitan dengan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif adalah kebijakan uang ketat atau *tight money policy*.

Instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dapat berupa:

1. Operasi pasar terbuka

Operasi pasar terbuka atau *open market operation* artinya adalah bahwa pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.

Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga. Dengan demikian, jumlah uang beredar dalam masyarakat akan mengalir ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.

Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Untuk lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini, Bank Indonesia telah mengembangkan kedua instrument tersebut dengan menambahkan fasilitas repurchase agreement ke masing-masing instrument, sehingga saat ini dikenal sebagai Sertifikat Bank Indonesia (SBI) repo dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) repo. SBI dan SBPU dilakukan jika jumlah uang beredar dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.

2. Fasilitas diskonto

Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank

sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.

Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat, maka pemerintah akan menurunkan tingkat pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Hal sebaliknya juga demikian.

3. Rasio cadangan wajib

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat adalah dengan melakukan himbauan moral. Otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Seperti contohnya, BI dapat memberikan saran agar lebih hati-hati dalam memberikan kredit atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral.

Tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kestabilan ekonomi
2. Menjaga kestabilan harga
3. Membuka kesempatan kerja
4. Memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran.

Fungsi dari kebijakan moneter ini adalah:

1. Menjaga iklim investasi di suatu negara
2. Membuka luas lapangan pekerjaan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
4. Meningkatkan neraca pembayaran
5. Mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang
6. Memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa
7. Menurunkan laju inflasi

Kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi

Kita akan menggunakan analisis IS-LM. Kebijakan moneter dikatakan efektif jika mampu mengendalikan tingkat output dan harga.

1. Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang-modal
Pengaturan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi kondisi keseimbangan pasar uang-modal.
2. Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi

Pergeseran kurva LM karena pengaruh perubahan jumlah uang beredar yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi, karena mengubah titik potong kurva IS-LM, yang berarti mengubah titik keseimbangan ekonomi.

Dalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat bunga mengindikasikan telah terjadinya permintaan investasi. Akibatnya dapat dilihat pada:

a. Sisi output

Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya penambahan kapasitas produksi menjadi lebih kecil.

b. Sisi biaya

Kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal.

Akibat dari kedua hal di atas adalah kenaikan harga dan memicu terjadinya inflasi.

Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada intinya adalah bertujuan sama namun berbeda pada instrumen atau alat yang digunakan.

Penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak dengan notasi yang digunakan adalah T dan untuk pengeluaran pemerintah digunakan notasi G.

Pajak

Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pajak juga dapat mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi. Pengeluaran pemerintah bersifat *autonomous*.

Secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun pajak bersifat memaksa, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak.

Berdasarkan definisinya, pajak yang nilainya positif menyebabkan pendapatan riil semakin rendah atau harga barang semakin mahal. Tetapi jika nilainya negatif (subsidi), pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah.

Pajak dapat dikalsifikasi sebagai berikut:

1. Pajak objektif
Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak.
2. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Jadi pembayar pajak langsung adalah pembayar pajak terakhir.
3. Pajak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Jadi pembayar pajak langsung adalah pembayar pajak terakhir.
4. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Pajak ini artinya jika yang dikenakan pajak adalah produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen.

Apabila yang dikenakan pajak adalah konsumen, maka konsumen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada produsen.

Tarif pajak ada dua macam, yaitu:

1. Pajak nominal
Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasar sejumlah nilai nominal tertentu (biasanya digunakan notasi t)
2. Pajak prosentase
Pajak prosentase, adalah pajak yang beban pajaknya ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari dasar pengenaan pajak (notasi yang digunakan adalah t).

Pajak ini dibedakan menjadi:

- a. Pajak proporsional
Pajak proporsional adalah pajak yang tarif persentasenya tetap. Misalnya, pajak penghasilan yang dikatakan proporsional yaitu bila berapa pun penghasilan seseorang, maka tarif pajaknya tetap sebesar 20%.
- b. Pajak progresif
Pajak progresif yaitu pajak yang tarifnya main tinggi bila dasar pajaknya makin tinggi. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya semakin tinggi pada saat pendapatan meningkat. Di Indonesia,

kita kenal UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tahun 2001.

c. Pajak regresif

Pajak regresif adalah kebalikan dari pajak progresif, dimana tariff pajak semakin rendah pada saat penghasilan meningkat.

Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi. Di sini, kita batasi pada pajak nominal dan pajak proporsional.

1. Pajak nominal

Pajak nominal mempengaruhi pendapatan disposable. Pendapatan (Y) dan pajak nominal (T), maka pendapatan disposable adalah:

$$Y_d = Y - T \dots\dots\dots 13.1.$$

Fungsi konsumsi (Keynes) adalah:

$$C = C_0 + bY_d \dots\dots\dots 13.2.$$

$$C = C_0 + b(Y - T)$$

$$C = C_0 + bY - bT$$

$$C = C_0 - bT - bY$$

Pajak nominal tidak mengubah nilai MPC, artinya bahwa pajak nominal tidak mengubah sensitifitas konsumsi akibat perubahan pendapatan. Aspek yang mengalami perubahan adalah konsumsi otonomus, dimana pajak nominal menyebabkan konsumsi otonomus menjadi lebih kecil sebesar bT.

2. Pajak proporsional

Jika pajak penghasilan yang dikenakan proporsional, maka pendapatan disposable adalah:

$$Y_d = Y - tY$$

$$Y_d = Y(1 - t) \dots\dots\dots 13.4.$$

Akibatnya fungsi konsumsi berubah menjadi:

$$C = C_0 + bY_d$$

$$C = C_0 + b\{Y(1 - t)\}$$

$$C = C_0 + bY - btY$$

$$C = C_0 + (b-bt)Y \dots\dots\dots 13.5.$$

Ternyata pajak proporsional menyebabkan MPC menjadi b-bt) atau lebih kecil sebesar bt, sedangkan konsumsi otonomusnya adalah tetap.

Politik anggaran

Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan (T) dan pengeluaran (G), politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Hal yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan.

Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan adalah:

$$\Delta Y = \Delta G / (1-b) \dots\dots\dots 13.6.$$

Pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah:

$$\Delta Y = - b\Delta T / (1 - b) \dots\dots\dots 13.7.$$

Anggaran berimbang dapat dibedakan menjadi anggaran deficit dan anggaran surplus.

1. Anggaran deficit

Anggaran deficit adalah anggaran yang memang direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Politik anggaran deficit, biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.

2. Anggaran surplus

Kebalikan dari anggaran deficit, dalam anggaran surplus pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus memanas.

Melalui anggaran surplus, pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Pengaruh anggaran surplus terhadap output keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran deficit.

3. Anggaran berimbang

Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan. Bila pemerintah memilih politik anggaran berimbang, dua hal yang ingin dicapai adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

Secara matematis, pengaruh anggaran terhadap keseimbangan ekonomi dapat dikatakan efek multipliernya adalah sama dengan satu.

Analisis IS – LM

Pada prinsipnya adalah bahwa keseimbangan umum ekonomi akan tercapai jika pasar barang-jasa dan pasar uang-modal secara simultan berada dalam keseimbangan ($I = S$ dan $L = M$). Secara grafis hal ini tercapai ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Analisis ini sangat sederhana dan masih digunakan untuk menganalisa kebijakan ekonomi makro yang penting.

Kondisi IS (*investment = savings*), keseimbangan pasar barang-jasa tercapai jika:

1. Penawaran barang dan jasa (AS) telah sama dengan permintaannya (AD).
2. Tingkat tabungan yang mewakili sisi AS telah samat dengan investasi yang mewakili sisi AD.

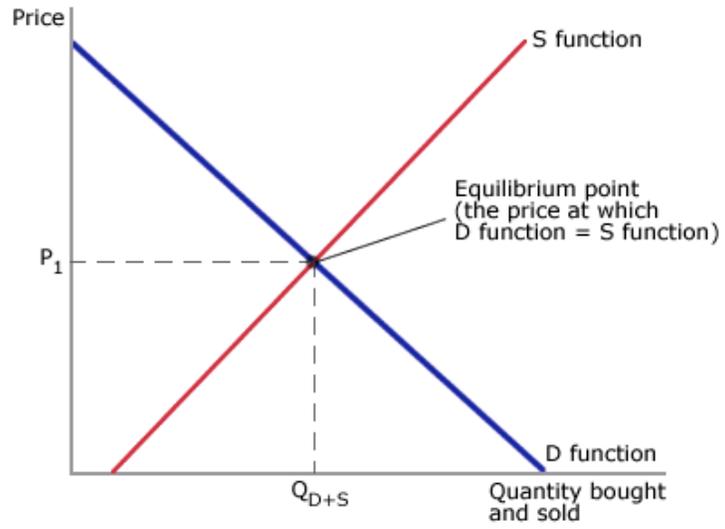
Keseimbangan pasar uang-modal tercapai jika:

1. Permintaan uang (*liquidity preference = L*) telah sama dengan penawaran uang (*money supply = M*).
2. Kondisi ini digambarkan oleh sebuah kurva LM.

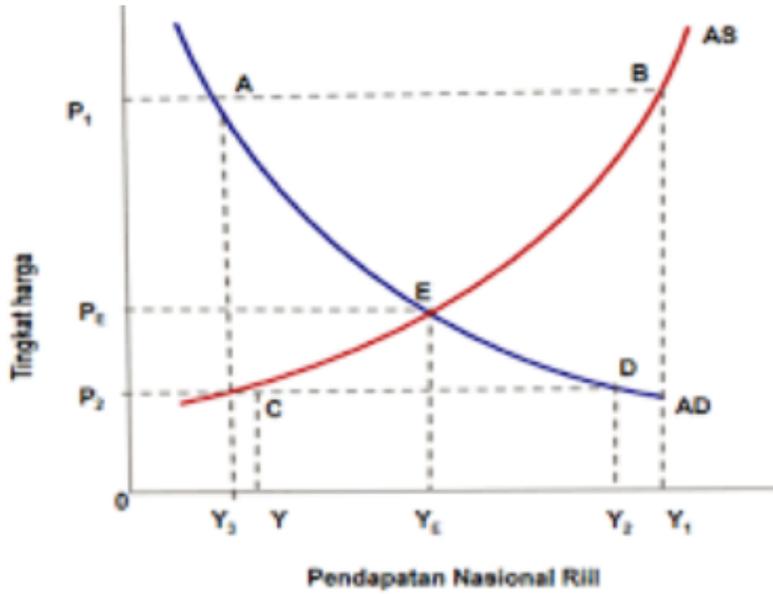
Asumsi-asumsi pokok model IS-LM:

1. Pasar akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan, dimana permintaan sama dengan penawaran.
2. Fungsi uang adalah sebagai alat transaksi dan spekulasi.
 $MD = Mt + Msp$ 13.8.
 Dimana:
 MD = total permintaan uang
 Mt = motif transaksi
 Msp = motif spekulasi
3. Berlaku Hukum Walras
 Jika dalam perekonomian terdapat sejumlah n pasar dan sebanyak $n-1$ pasar telah mencapai keseimbangan, maka pasar ke n pastilah telah mencapai keseimbangan.
 Artinya jika pasar barang-jasa dan pasar uang-modal telah berada dalam keseimbangan, maka pasar TK juga telah mencapai keseimbangan.
4. Perekonomian adalah perekonomian tertutup yang menyebabkan total penghasilan atau total produksi yang tidak dikonsumsi, ditabung di dalam negeri $Y = C + S$
5. Model IS-LM merupakan model komparatif statis, artinya mengabaikan dimensi perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga analisis yang dilakukan adalah perubahan dari satu kondisi keseimbangan ke kondisi lainnya.

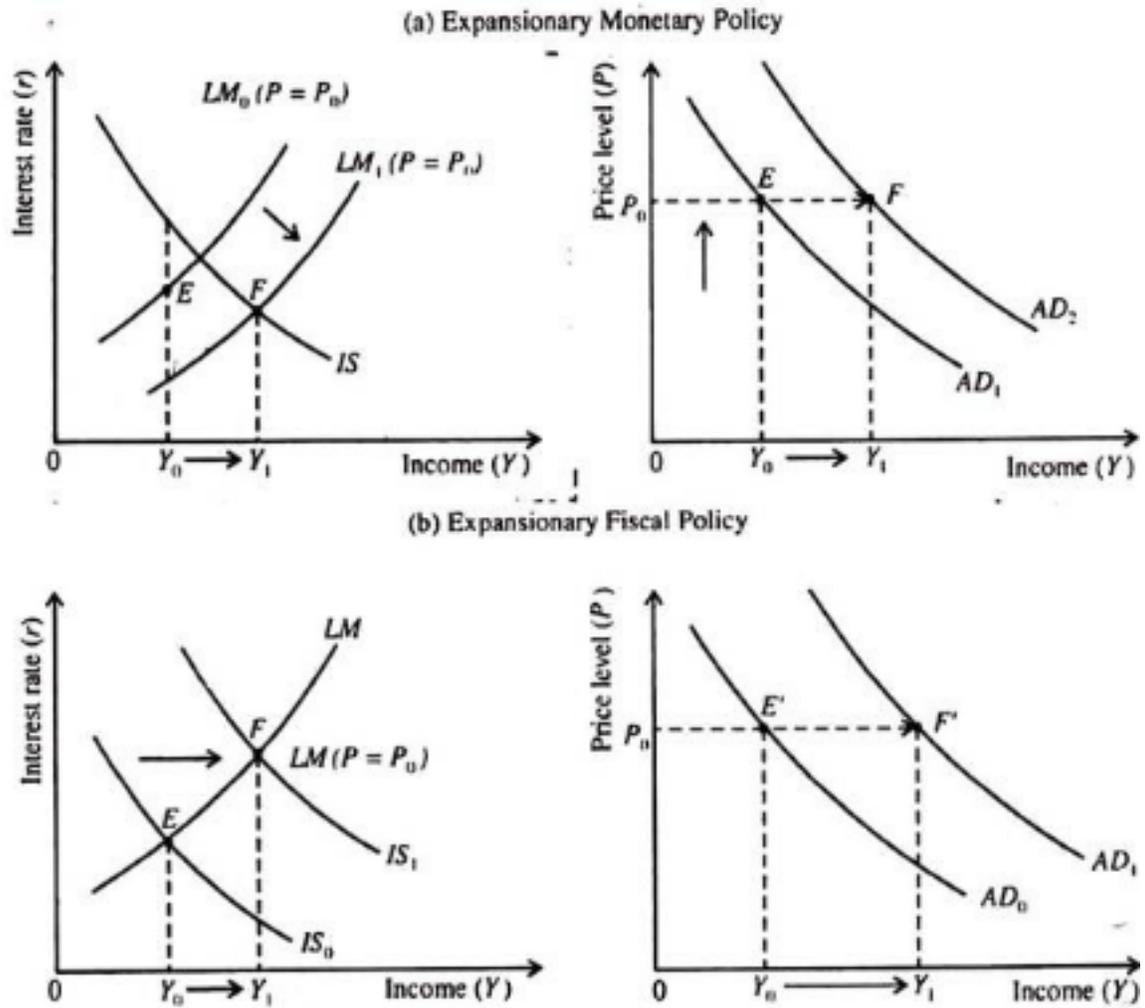
Pemahaman kurva



Gambar 1. Kurva S dan D

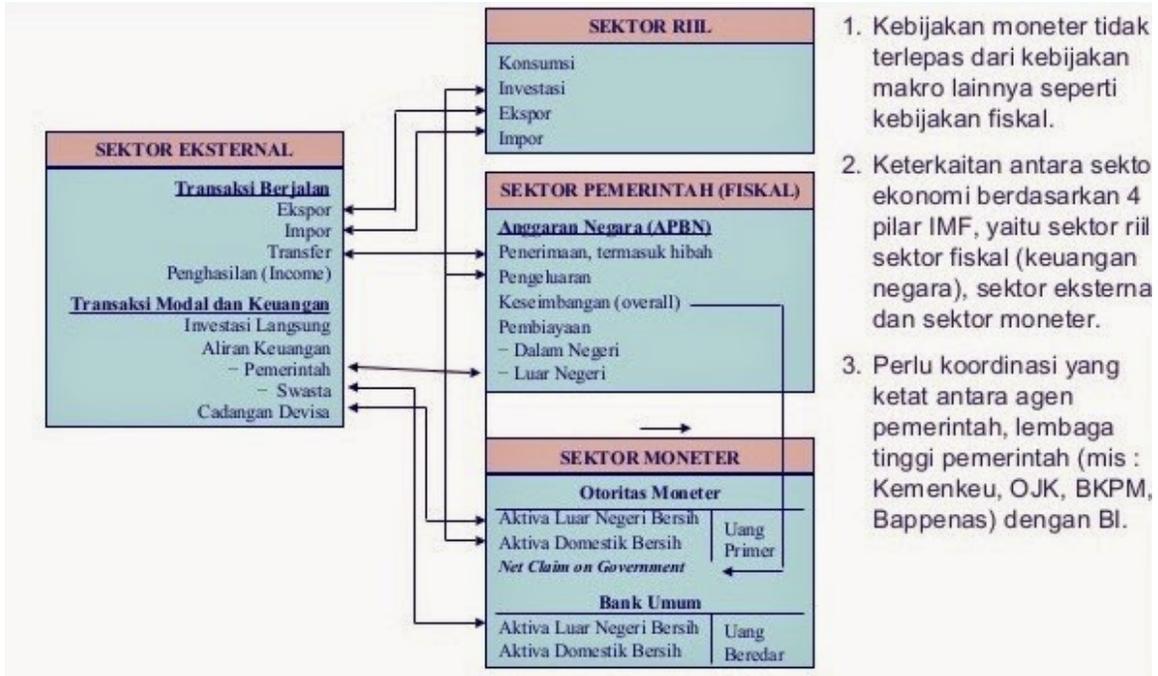


Gambar 2. Kurva AS dan AD



Gambar 3. Pergeseran Kurva AD

Sebagai rangkuman dalam suatu bagan:



1. Kebijakan moneter tidak terlepas dari kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal.
2. Keterkaitan antara sektor ekonomi berdasarkan 4 pilar IMF, yaitu sektor riil sektor fiskal (keuangan negara), sektor eksterna dan sektor moneter.
3. Perlu koordinasi yang ketat antara agen pemerintah, lembaga tinggi pemerintah (mis : Kemenkeu, OJK, BKPM, Bappenas) dengan BI.

Gambar 4. Sektor Eksternal dan Sektor Riil

Bahan diskusi kelas:

Apakah perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter?

Kesimpulan:

1. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat.
2. Instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajib.
3. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluarannya.
4. Anggaran defisit dibagi atas: defisit konvensional, defisit moneter, defisit operasional, dan defisit primer.

Referensi:

1. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi. Penerbit: Andi Yogyakarta. 2015. (Ekonomi Mikro)
2. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Unievrstias Indonesia. 2008.
3. *Economic - Pengantar Mikro dan Makro*. Penerbit: Mitra Wacana Media. Iskandar Putong. 2013.
4. *Academic Journal*.